

[SNP – 02]

Diskursus Pemikiran Manusia sebagai Objek Referensi Keamanan Militer dan Non-Militer dalam *Peacekeeping Operations* di Konflik Sudan

Rizal Adhitya Hidayat^{1*}, Denny Angela², Ghina Hana Zafira¹

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.

²Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: hidayatrizal175@gmail.com

Abstract - This research provides a critical exploration of the discourse of human thought as an object of security reference in the case of the Sudan Conflict in providing a review of the encounter of military and non-military security threat dimensions. The fundamental problem of this research boils down to how the discourse of human security thinking in the Sudan Conflict is understood through the two dimensions of security threats above, based on the securitization approach of cosmopolitanism and the dualism of the critical relationship between human security and state security. The research applied the qualitative method from analytical description through literature study review. The results of this research signify that the discourse of human thought as an object of reference for military and non-military security in the Sudan Conflict as part of the new war discovered momentum for the two approaches above related to the main tasks and functions of peacekeeping operations according to the mandate of UNSC resolution 2086. Both of the above approaches synthesize the realization of critical human security as part of a cosmopolitan society related to releasing ideal human security threats (*true security*) from state security in the Sudan Conflict. Not only does it perceive humans as objects of security threats with a military dimension, but its responsiveness is related to the responsibility of the state to emancipate humans from the dimension of non-military security threats.

Keywords- *Human Security, Military Security, Non-Military Security, Peacekeeping Operations, Sudan Conflict.*

Abstrak - Penelitian ini memberikan eksplorasi kritis terhadap wacana pemikiran manusia sebagai objek acuan keamanan dalam kasus Konflik Sudan dalam memberikan tinjauan terhadap pertemuan dimensi ancaman keamanan militer dan non-militer. Permasalahan mendasar dari penelitian ini bermuara pada bagaimana wacana pemikiran keamanan manusia dalam Konflik Sudan dipahami melalui dua dimensi ancaman keamanan di atas, berdasarkan pendekatan sekuritisasi kosmopolitanisme dan pendekatan dualisme hubungan kritis antara keamanan manusia dan keamanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dari deskripsi analitis melalui tinjauan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pemikiran manusia sebagai objek referensi keamanan militer dan non-militer dalam Konflik Sudan sebagai bagian dari perang baru menemukan momentum pada dua pendekatan di atas, terkait tugas pokok dan fungsi operasi pemeliharaan perdamaian sesuai mandat Resolusi DK PBB 2086. Kedua pendekatan di atas mensintesiskan realisasi keamanan manusia kritis sebagai bagian dari masyarakat kosmopolitan terkait melepaskan ancaman keamanan manusia yang ideal dari keamanan negara dalam Konflik Sudan. Tidak hanya melihat manusia sebagai objek ancaman

keamanan berdimensi militer, namun resiproktivitasnya terkait dengan tanggung jawab negara membebaskan manusia dari dimensi ancaman keamanan non-militer.

Kata kunci- Keamanan Manusia, Keamanan Militer, Keamanan Non-militer, Peacekeeping Operations, Konflik Sudan

PENDAHULUAN

Fenomena isu keamanan internasional yang pada masa era perang dingin cenderung menempatkan negara sebagai obyek referensi keamanan. Negara sebagai obyek referensi keamanan secara esensial merupakan obyek utama ancaman keamanan nasional karena terdapat faktor keamanan teritorial dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, keamanan nasional dalam hal ini merupakan refleksi atas unsur kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara. Akumulasi unsur kekuatan nasional tersebut adalah unsur geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kekuatan pemerintah. Selama fase perang dingin, kita menyaksikan negara secara reflektif menghadirkan konteks realisme ancaman politik keamanan nasional sebagai konsekuensi logis dalam kompetisi politik internasional antar negara-bangsa lain. Kompetisi politik internasional, dalam terminologi pemikiran dimaknai sebagai perebutan kekuasaan yang bermuara terhadap tiga pola politik internasional yang mencakup: politik status quo, politik imperialisme dan politik prestise [1].

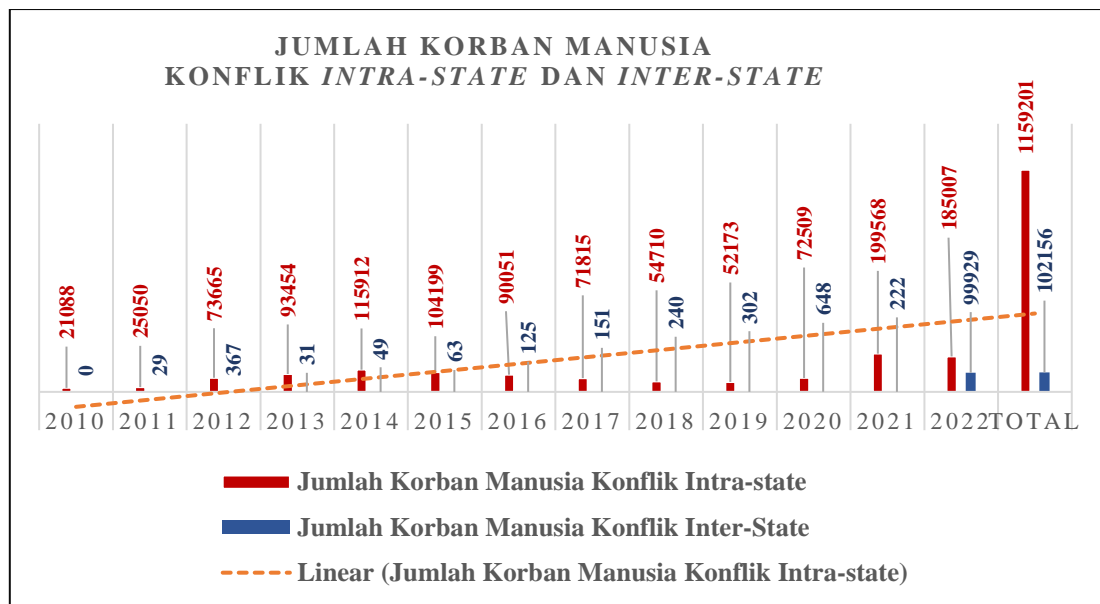
Perebutan politik *status quo*, politik imperialisme dan politik prestise menghasilkan konflik bersenjata antar negara (*inter-state conflict*) atau yang lazim dikenal sebagai *conflict between states*. Konflik bersenjata (militer) antar negara lebih menekankan pada perebutan kedaulatan wilayah, rakyat dan kekuasaan pemerintah negara-bangsa secara langsung. Paling tidak terdapat sembilan konflik antar negara yang menegaskan eksploitasi

akumulasi unsur kekuatan nasional sebagai manifestasi ancaman keamanan negara dalam kompetisi politik internasional. Kesembilan konflik dalam wujud perang antar negara tersebut dirangkum melalui Tabel 1.

Dari Tabel 1, korban sipil maupun militer akibat konflik bersenjata dalam perang tersebut (*battle deaths*) paling banyak adalah perang dunia kedua sebesar 12.948.300 dari total 28.909.600 korban jiwa atau sekitar 45% terbanyak dari perang-perang sebelumnya.[2] Kesemuanya menunjukkan bahwa dalam suatu konflik militer bersenjata yang bersifat antar negara (*inter-state*), faktor manusia merupakan objek referensi keamanan yang paling rawan menjadi korban perang dari ancaman keamanan militer itu sendiri, termasuk korban jiwa penduduk sipil di dalamnya. Korban jiwa manusia dalam perang dunia tersebut berkontribusi terhadap keamanan manusia yang secara ekosistem kehidupannya terganggu/terancam oleh eksistensi keamanan militer. Meskipun pasca perang dunia kedua terjadi fenomena perang dingin (1950-1989), namun karakteristik perang dingin dan sesudahnya (termasuk perang terorisme) berbeda dengan kesembilan perang dalam Tabel 1. Setelah perang dunia kedua, peperangan antar negara lebih bersifat laten, ideologis maupun perang proksi, dan bukan penggelaran kekuatan militer/bersenjata secara langsung antar negara. Penggelaran kekuatan militer/bersenjata mengalami pergeseran konflik dalam perkembangannya lebih menciptakan korban jiwa manusia dalam bentuk ancaman keamanan non-militer. Pergeseran konflik ini kemudian lebih dikenal sebagai konflik *intra-state*.

Tabel 1. Perang Antar Negara [2]

No	Perang	Durasi	Negara Yang Terlibat
1	<i>Thirty Years War</i>	1618-1648	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
2	<i>Dutch War of Louis XIV</i>	1672-1678	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
3	<i>War of The League of Augsburg</i>	1688-1697	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
4	<i>War of the Spanish Succession</i>	1701-1713	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
5	<i>War of The Austrian Succession</i>	1739-1748	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
6	<i>Seven Years War</i>	1755-1763	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
7	<i>French Revolutionary/Napoleonic Wars</i>	1792-1815	Inggris, Perancis, Austria, Belanda, Spanyol, Swedia
8	<i>World War I</i>	1914-1918	Austria-Hongaria, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang Rusia, Amerika Serikat
9	<i>World War II</i>	1939-1945	Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Amerika Serikat



Gambar 1. Konflik *Intra-State* dan *Inter-State* (2010-2022) [4]

Konflik *intra-state* merupakan konflik bersenjata berbasis pada perjuangan gerakan penyatuan keyakinan (ideologi), tujuan dan perebutan wilayah didalam suatu negara. Konflik *intra-state* melibatkan berbagai kelompok bersenjata dengan motif gerakan bersenjata untuk menjatuhkan atau mengganti kekuasaan pemerintahan yang dilakukan secara politik, ideologi maupun alasan keuangan (*financial political reasons*). Berbagai kelompok bersenjata dalam konflik *intra-state* bisa juga dilakukan melalui kejahatan politik oleh pelaku aktor negara (*state-sanctioned violence*) misalnya polisi, militer maupun kelompok pemerintah terhadap warga negara-nya sendiri selain melibatkan berbagai kelompok bersenjata yang memperebutkan otoritas kendali atas pengelolaan sumber daya alam. [3]

Dalam perkembangannya, persoalan keamanan manusia sebagai korban terbesar ancaman keamanan menunjukkan kenaikan jumlah korban jiwa dalam konflik *intra-state* sampai dengan tahun 2022. Dalam kurun waktu tahun 2010-2022 kontribusi jumlah korban jiwa manusia akibat konflik *intra-state* mengalami kenaikan sebesar 90% dibandingkan dengan konflik antar negara (konflik *inter-state*). Pemahaman tersebut dapat dijelaskan melalui Gambar 1 [4]. Berdasarkan penjelasan gambar 1 maka konflik *intra-state* (warna merah) menghasilkan jumlah korban kematian total terbesar yaitu 1.159.201 jiwa dibandingkan dengan konflik *inter-state* (warna biru) dengan total sebesar 102.156 jiwa. Oleh karena itu berdasarkan jumlah total

kematian korban manusia akibat kedua konflik tersebut sebesar 1.261.357 jiwa, maka trend linearitas jumlah kematian karena konflik *intra-state* meningkat semenjak tahun 2010 dengan persentase sebesar 90% total kematian korban jiwa manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan Gambar 1 meskipun tidak bersifat konflik militer antar negara (*inter-state*), namun konflik *intra-state* merupakan kombinasi ancaman konflik bersenjata terhadap manusia sebagai objek referensi keamanan militer dan non-militer.

Pemahaman awal terkait manusia sebagai objek referensi keamanan sebagai bagian dari isu keamanan yang non-tradisional (non-militer) mengemuka pada akhir dekade 1990-an. Pengertian mengenai keamanan non-tradisional (non-militer) tersebut mengalami dialektika diskursus eksistensinya terhadap keamanan tradisional. Keamanan non-tradisional kemudian menghasilkan globalisasi keamanan dunia yang lebih bervariasi terkait isu dan obyek referensi keamanan. Globalisasi keamanan dunia dimulai ketika kelompok *the Copenhagen School* menjelaskan sekuritisasi keamanan kepada persoalan-persoalan ancaman keamanan seperti masalah pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam dan sebagainya sebagai bagian dari perluasan studi keamanan terkait obyek rujukan (*referent object*) isu keamanan dengan tidak lagi bicara keamanan “negara” saja, tetapi juga menyangkut keamanan “manusia”. Pandangan ini menjelaskan sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai

dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi pada saat yang sama adanya peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, terorisme dan sebagainya [5]. Namun demikian, adanya perluasan objek referensi dari *Copenhagen School* diatas masih menempatkan manusia sebagai subordinasi preferensi obyek keamanan dalam perspektif keamanan negara.

Hal ini secara ideal, sebenarnya pergeseran isu maupun objek referensi keamanan masih belum menunjukkan eksistensi makna dan hakekat ancaman keamanan manusia yang sebenarnya sebagai suatu pendekatan studi keamanan pasca berakhirnya perang dingin tersebut. Paling tidak makna dan hakekat ancaman keamanan manusia tersebut mereferensi resolusi PBB 66/2012 terkait aplikasi keamanan manusia dalam mencapai tujuan keamanan manusia yang mencakup: Hak manusia untuk hidup merdeka dan bermartabat; Bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan; Keterkaitan antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia; Mempertimbangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; Keamanan manusia berbeda dari tanggung jawab untuk melindungi dan tidak dengan cara kekerasan atau tindakan pemaksaan. Kemudian yang terakhir terkait keamanan manusia merupakan bagian dari solusi nasional yang tidak bertentangan dengan keamanan nasional. Keenam esensi realisasi tujuan yang ingin dicapai dalam keamanan manusia tersebut menjadi tolak ukur terhadap pencapaian tujuh dimensi keamanan manusia, yaitu: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas, dan yang terakhir adalah keamanan politik. [6]

Penelitian-penelitian mengenai Konflik Sudan sebelumnya banyak menekankan pada analisis peran penting politik negara dalam menjalankan kepentingan nasional-nya untuk menciptakan pemulihan keamanan dan perdamaian di dalam konflik tersebut. Sebagai contoh yang pertama, penelitian mengenai peran India dalam *Peacekeeping Operations* di Konflik Sudan Selatan. Kepentingan India dalam menempatkan personel militer-nya dalam *peacekeeping operations* di Sudan Selatan merupakan bagian dari kepentingan nasional-nya untuk berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia terkait kebijakan luar negeri India yang tergabung dalam UNMISS (*United Nations Mission in South Sudan*).[7] Dengan penekanan pada representasi Pendekatan

Teori Realisme dalam studi hubungan internasional, maka kebijakan luar negeri India adalah kontribusi politik keamanan internasional India di Dewan Keamanan PBB (DK-PBB).

Penelitian pendahuluan berikutnya yang kedua berhubungan dengan dimensi internal Konflik Sudan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dimensi internal Konflik Sudan melalui pendekatan konflik politik pemerintahan di dalam pemerintah Sudan. Konflik politik pemerintahan yang dimaksud disini berhubungan dengan konflik politik domestik yang dilakukan oleh rivalitas dua aktor politik lokal dalam rangka memenangkan perebutan otoritas dan wewenang atas kendali pemerintahan Sudan. Kedua aktor politik lokal tersebut adalah RSF (*Rapid Support Forces*) dan SFA (*Sudanese Armed Forces*). [8] Disamping itu penelitian ini juga menjelaskan keterkaitan konflik politik pemerintahan Sudan tersebut dengan intervensi elit politik lokal yang berbasis pada kelompok paramiliter (milisi/kelompok sipil bersenjata di luar militer resmi/negara). Oleh karena itu berdasarkan analisis dimensi internal konflik Pemerintahan Sudan tersebut, pelibatan unit analisis penelitian melalui peran aktor negara menjadi fokus utama tujuan dan signifikansi dalam penelitian ini, dimana peran aktor negara tersebut kemudian dideskripsikan korelasinya melalui pendekatan analisis konflik politik pemerintahan, realisme politik internasional maupun relasinya dengan elite politik lokal.

Berdasarkan kedua kajian penelitian pendahuluan, maka kebaruan (*novelty*) penelitian di dalam tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi diskursus manusia sebagai obyek referensi keamanan yang terdialektika dari tanggung jawab ancaman negara-bangsa secara keamanan militer dan non-militer melalui studi kasus Konflik Sudan. Oleh karena itu, diskursus penempatan manusia sebagai obyek referensi keamanan ini kemudian dideskripsikan kaitannya pada *peacekeeping operations* konflik Sudan yang dianalisis melalui pendekatan sekuritisasi kosmopolitanisme dan dualisme hubungan kritis antara keamanan manusia dan keamanan negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelaahan *library research* berdasarkan sumber-sumber data penelitian berupa buku-buku, artikel, jurnal, tabel/grafik dan dokumen terkait

berbagai literatur studi keamanan, keamanan manusia, Konflik Sudan dan *peacekeeping operations*. Kesemua sumber data tersebut dikumpulkan, dianalisis dan kemudian direduksi sebagai bagian dari *display* data yang diverifikasi dalam menghasilkan validitas data yang dibutuhkan terkait di dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan teori keamanan kritis melalui pendekatan sekuritisasi keamanan manusia dan relasi dualisme kritis keamanan manusia dan negara yang diimplikasikan pada *peacekeeping operations* Konflik Sudan. Pendekatan teori keamanan kritis dihasilkan dari pemikiran Ken Booth mewakili perspektif *Welsh School*. Pengertian keamanan kritis ini terkait pada pemisahan antara keamanan negara dan keamanan manusia selama ini. Oleh karena itu relasi kritis keamanan negara dan keamanan manusia diperlukan melalui adanya emansipasi keamanan terkait sekuritisasi keamanan negara dan keamanan manusia. Dalam hal ini, maka ketiadaan ancaman keamanan negara dan manusia merupakan ketidakhadiran ancaman keamanan secara menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam suatu negara. Operasi pemeliharaan perdamaian dunia berhubungan dengan konflik keamanan yang secara kosmopolitan merupakan konflik keamanan internasional di dalam suatu negara berdasarkan kedaulatan (*sovereignty*), kewarganegaraan (*citizenship*) dan kemanusiaan (*humanity*) yang mengalami ancaman keamanan negara dan manusia baik secara militer maupun non-militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekuritisasi Perang Baru Keamanan Manusia di Konflik Sudan

Konflik Sudan memberikan suatu refleksi akan manifestasi eksistensi *new wars* (perang baru). Hal ini disebabkan karena *new wars* memberikan koeksistensi diskursus ancaman terhadap eksistensi manusia dan tujuan yang ingin dicapai dalam keamanan manusia sebagai objek referensi keamanan yang diinterpretasi secara beragam. Kepastian interpretasi diskursus tersebut menempatkan manusia sebagai objek referensi keamanan terkait kolaborasi ancaman keamanan militer dan non-militer.

Perang saudara di Sudan antara wilayah Utara dan Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1956 dengan berakhirnya pemerintahan Anglo-Mesir, kemudian perang saudara ini diakhiri oleh perjanjian Addis

Ababa pada tahun 1972. Hal ini membentuk perubahan sistem pemerintahan Sudan dengan penetapan secara resmi Sudan sebagai negara Islam dan pemberlakuan hukum Syariah pada tahun 1983, oleh Jenderal Gaafar Muhammad Nimeri, namun hal ini membentuk ketegangan konflik lebih lanjut. [9]

Sebagian besar penduduk Sudan yaitu 70% memeluk Islam Sunni, 20% Nasrani, dan 10% agama tradisional suku adat. Sejak tahun 1956, penempatan pemerintahan dengan ideologi mayoritas Islam telah mengambil alih kekuasaan, baik dengan demokratis pada tahun 1964 dan 1986, dengan konversi pada tahun 1976, maupun dengan kudeta pada tahun 1989. Pemerintahan Islam terlama adalah pemerintah Omar al-Bashir. Kemudian pemerintahan tersebut melakukan kampanye militer, kekerasan terhadap Sudan Selatan dan penganiayaan penduduk nasrani, serta marginalisasi suku non-Arab. Hal ini membentuk perang antara Utara dan Selatan Sudan. [10]

Perang antara Utara dan Selatan Sudan kemudian berlanjut sampai dengan diadakannya perjanjian perdamaian pada tahun 2005 yaitu *Comprehensive Peace Agreement/CPA* untuk menghentikan perang Utara-Selatan Sudan. Namun demikian konflik tetap terjadi setelah adanya CPA seperti pada Oktober 2007, intensitas pasukan Selatan meningkat dengan berkumpulnya pasukan tersebut di perbatasan Utara-Selatan yaitu di wilayah Khartoum bagian Selatan. Bagian selatan Sudan yaitu Juba, menghabiskan 1 miliar USD pada tahun 2009 untuk keperluan militer terorganisir dan memicu perselisihan suku di Selatan dengan adanya tambahan 100.000 pasukan dari masyarakat sipil. [10]

Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada tahun 2011, namun mengalami konflik pada tahun 2013 sejak Presiden Salva Kiir menuduh wakilnya, Presiden Riek Machar mencoba melakukan kudeta. Sehingga, *People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) terbagi menjadi dua dengan kemunculan SPLM-*In Opposition* (SPLM-IO) yang dibentuk oleh Wakil Presiden Machar. Pihak SPLM/A yang mencari etnis Nuer dianggap dekat dengan SPLM-IO. Kedua pihak saling menyerang dan melakukan pemberontakan di Sudan Selatan. Selain itu, perselisihan internal dalam SPLM/A yang terjadi sejak tahun 1982 juga mempengaruhi adanya konflik di antara keduanya, dengan adanya perbedaan gaya kepemimpinan, tujuan keseluruhan kelompok, dan perselisihan pembagian kekuasaan. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah munculnya dua keinginan untuk mempertahankan

Sudan yang bersatu atau pemisahan Sudan Selatan. Hal tersebut menimbulkan perpecahan politik struktural intra SPLM/A. Hal ini juga dipicu dengan perbedaan etnis di antara kedua kelompok baik SPLM/A maupun SPLM-IO, yaitu Presiden Kiir (SPLM/A) berasal dari etnis Dinka dan pemimpin gerakan protes, kemudian Machar (SPLM-IO) berasal dari etnis Nuer. Kekuatan politik SPLM/A menguat tanpa adanya kapasitas dewan pemerintah pusat dan bagian yang mumpuni untuk melaksanakan pemerintahan. Hal ini juga mempengaruhi kondisi politik Sudan Selatan. [11]

Disamping itu, selain ketiadaan komitmen dalam kesepakatan, permasalahan alokasi dana pemerintah yang tidak transparan juga mempengaruhi kondisi pemerintahan Sudan Selatan ketika SPLM/A menggunakan 135.000 US Dollar anggaran milik *National Pre-Transnational Committee's* (NPTC) untuk kepentingan pribadi. Kemudian sejak tahun 2005, Sudan Selatan telah mengalami berbagai disintegrasi institusi lokal, jaringan komunal, dan segmentasi etnis. Sudan Selatan juga telah memiliki desentralisasi sistem pemerintahan yang terbagi atas nasional, negara bagian, dan lokal, dengan tingkat lokal yang tetap melibatkan pemimpin adat. Sejak perang saudara Sudan tahun 1983 - 2005, komunitas lokal tersebut terpecah dan pemimpin adat (tradisional) kehilangan kekuasaannya dengan adanya komunitas bersenjata yang melemahkan tingkat nasional dan lokal Sudan Selatan. Sehingga pada tahun yang sama, dibentuk perjanjian perdamaian di bawah PBB yaitu melalui *UN Mission in Sudan* (UNMIS) yang berfokus pada pembangunan negara baru dari pusat, tanpa adanya strategi dalam menyelesaikan ketegangan lokal dan pertikaian antar komunal. [11]

Perselisihan antara pemerintahan Kiir dan kelompok pemberontak Machar mempengaruhi kondisi dan situasi kemanusiaan di Sudan Selatan. Pada Juli 2019, laporan dari UNMISS mempublikasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pasukan pemerintah dan pemberontak. Laporan publikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia ini berupa 104 pembunuhan warga sipil, 187 penculikan, dan 99 kasus kekerasan sejak September 2018. Kemudian laporan dari *International Organization for Migration* (IOM) mencatat kepulauan 534.082 pengungsi yang membutuhkan perawatan kesehatan dan pendidikan, makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Perang saudara dua puluh tahun antara Utara dan Selatan pada tahun 1983 – 2005, telah mengakibatkan kematian lebih dari 2 juta orang dan lebih dari 4 juta pengungsi, hingga

pemberontakan Darfur. Kemudian hal ini dipengaruhi juga oleh penemuan sumber daya minyak di Sudan pada tahun 1998. [10]

Selain konflik Sudan yang memisahkan Sudan dan Sudan Selatan, terdapat konflik Darfur yang menjadi konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan di Sudan terutama wilayah Darfur telah terjadi juga sejak perang saudara tahun 1956. Pemberontakan berkepanjangan di Darfur terjadi akibat adanya marginalisasi suku non-Arab, atas kebijakan Arabisasi di bawah kepemimpinan Bashir. Pasukan pemberontak kemudian melawan pemerintah pada tahun 2003 yang ditanggapi pasukan Janjaweed (pasukan pemerintah yang mayoritas suku Arab). Hal ini menimbulkan 300.000 korban warga sipil dan lebih dari 2 juta pengungsi. Hal ini membentuk tuntutan *International Criminal Court* (ICC) terhadap Presiden Bashir atas kejahatan kemanusiaan tahun 2009 dan genosida tahun 2010.

Konflik di Darfur berasal dari terpinggirkannya suku-suku non-Arab di bawah dominasi politik, budaya, dan sosial-ekonomi elit Arab di Sudan, terutama sejak adanya kebijakan Arabisasi pemerintahan Bashir pada tahun 1983. Hal ini kemudian membentuk gerakan pemberontakan yang bertujuan menghentikan rezim penguasa dan mendirikan negara yang multi-etnis selain permasalahan etnis tersebut. Sudan juga memiliki perselisihan antara sumber daya alamnya. Persaingan atas tanah dan sumber daya alam antara wilayah Khartoum dan Darfur juga menjadi sumber konflik. Suku-suku non-Arab di Darfur menuntut keadilan distribusi pendapatan pusat yaitu Khartoum ke daerah yaitu Darfur, serta pemberontak akibat pengusiran petani dan penggembala non-Arab Darfur di Khartoum. Masuknya tenaga asing dari wilayah Chad juga memperkuat konflik yang terjadi akibat aspek tanah dan sumber daya tersebut. Selain itu, hubungan antara Sudan dan Sudan Selatan tetap mengalami ketidakstabilan akibat belum terselesaikannya perbatasan dan permasalahan sumber daya alam. [11]

Relevansi keamanan manusia dari latar belakang konflik Sudan di atas tidak dapat dipisahkan dari pergeseran isu keamanan yang mulai menempatkan manusia sebagai bagian dari keamanan non-tradisional yang terpisah dari konflik bersenjata dengan pelibatan pasukan-pasukan reguler. Pelibatan pasukan-pasukan reguler disini terkait dengan keamanan tradisional (militer) berupa perang lama (*old wars*) yang merupakan perang antar negara. Perang antar negara yang terjadi

melalui pertempuran antar angkatan bersenjata (militer), dan perang yang ditentukan oleh pertemuan antar pasukan militer yang jelas berbeda dengan warga sipil. Tidak ada perang yang terjadi sama sekali dengan model perang tersebut, yang tentu saja model perang tersebut diambil dari perang abad ke-20 dan imajinasi perang yang terjadi pada masa perang dingin. Suatu perang baru diperjuangkan oleh kombinasi aktor negara dan non-negara, dan biasanya berjuang bukan karena alasan negara atau ideologis, tapi untuk identitas. Pertempuran jarang terjadi, namun kekerasan dari perang tersebut paling banyak diarahkan terhadap warga sipil. Hal inilah yang begitu penting untuk dipahami dalam perang baru (*new wars*). [12]

Terkait pemahaman perjuangan identitas sebagai argumentasi dari seperti yang terjadi pada Konflik Sudan, maka politik identitas memiliki kecenderungan ter-fragmentatif, terbelakang, dan eksklusif. Pengelompokan politik berdasarkan eksklusif identitas cenderung menjadi gerakan pengulangan sejarah masa lalu. Berdasarkan rekonstruksi masa lalu yang heroik, kenangan akan ketidakadilan, yang nyata atau dapat dibayangkan, dan merupakan peperangan terkenal, baik menang atau kalah. Para aktor yang terlibat peperangan memperoleh makna melalui rasa tidak aman, juga kemunculan kembali rasa takut terhadap oposisi/lawan politik di masa lalu, atau terancam oleh mereka yang memiliki identitas politik berbeda. Pemaknaan politik identitas tersebut selalu dapat difragmentasi kembali. Kemurnian budaya atau homogenitas bukan faktor utama. Setiap politik berbasis identitas eksklusif pasti menghasilkan identitas minoritas. Paling tidak politik identitas melibatkan diskriminasi berdasarkan tekanan psikologis terhadap yang minoritas. Kemudian akan mengarah pada pengusiran populasi dan genosida. Politik identitas muncul dari disintegrasi atau struktur pemerintahan negara modern dalam sistem politik pemerintahan yang totaliter dan sentralistik. [13]

Dari penjelasan Kaldor, maka dapat dipahami bahwa keamanan manusia menjadi suatu hal yang relevan ketika dihadapkan dengan terjadinya perang dan ancaman perang yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai kerusakan eksistensi keamanan manusia. Pengalaman dua perang dunia (perang dunia pertama dan kedua) dan perang dingin menjadi bukti nyata bahwa kerusakan eksistensi keamanan manusia justru memiliki dampak kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kerusakan infrastruktur maupun instrumen militer

yang terlibat langsung dalam peperangan. Hal tersebut dikaitkan dengan beberapa elemen penting fenomena perang baru pasca perang dingin dengan mengacu kepada pandangan Kaldor sebelumnya. [14]

Konflik Sudan menjadi parameter pergeseran orientasi perang-perang lama (*old wars*) dan perang-perang baru (*new wars*) yang terdiri atas tiga elemen penting. Kaldor menjelaskannya pada faktor yang *pertama*, bahwa pemimpin politik dalam negara yang busuk menggunakan suatu politik pengkotakan, memanfaatkan ketakutan kelompok-kelompok masyarakat dan mengadu domba mereka. Ini bukan merupakan bangkitnya kembali nasionalisme tradisional, melainkan politik buas dan aneh yang dijalankan para elit korup untuk mempertahankan kedudukannya dan menguras kekayaan. *Kedua*, bahwa kekerasan didesentralisasi, perang banyak dilakukan oleh kelompok milisi dan penjahat maupun pasukan regular, dan perang terutama ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu. *Ketiga*, perkembangan ekonomi perang yang mengglobal: negara-negara yang gagal dalam orde internasional baru ekonominya telah hancur dan para elitnya mengandalkan hasil jarahan dan penjualan bahan mentah di pasar dunia untuk mempertahankan kedudukannya. [13] Berdasarkan faktor pemimpin politik, kekerasan politik yang terdesentralisasi dan globalisasi ekonomi perang, maka ketiga faktor tersebut memberikan eses terjadinya perang baru (*new wars*). Perang baru (*new wars*) dalam konflik Sudan yang mereferensikan keamanan manusia berupa jatuhnya korban pihak sipil karena konflik politik identitas yang difragmentasi dalam disintegrasi politik pemerintahan Sudan melalui ketiga elemen perang baru (*new wars*).

Peacekeeping Operations Konflik Sudan: Dualisme kritical Relasi Keamanan Manusia dan Negara

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari Konflik Sudan. Maka sebenarnya konflik tersebut memberikan ancaman penting melalui kehadiran ketiga elemen di atas terhadap keamanan manusia itu sendiri. Konflik Sudan memberikan ruang terbuka tersendiri bagi diskursus manusia sebagai objek referensi keamanan akan dualisme kritical relasi keamanan manusia dan keamanan negara. Hal ini dikarenakan ancaman keamanan manusia bersumber dari sifat ancaman (*threats*) dan subyek yang terancam (*threatened*) di samping dampak yang diberikan dari ancaman tersebut melalui Tabel 2.

Sifat ancaman dan subyek ancaman keamanan dalam konteks manusia baik individu maupun kelompok melalui Tabel 2 yang diperkuat dalam karakteristik keamanan manusia dalam Tabel 3 (kolom *Human-Centric Security-The Narrow School*) menunjukkan relevansinya dalam konflik Sudan. Dalam konteks karakteristik keamanan manusia maka penggunaan kekuatan militer untuk menetralkan kerusakan eksistensi keamanan manusia terkait sifat dan sumber ancamannya dalam hal ini tetap diperlukan. Oleh karena itu,

menjelaskan kedua kekuatan keamanan tersebut tergantung dari penempatan lokus relasi mereka sebagai *a dual conceptualization of security*. Hal inilah yang menjadikan dualisme kritical relasi keamanan manusia dan keamanan negara di dalam Konflik Sudan menemukan momentum kritical relasinya dalam karakteristik bentuk *human-centric security* dan *state-centric security*. Kerr kemudian mengeksplorasi karakteristik keduanya tersebut mencakup faktor objek referensi keamanan, jenis ancaman, sifat keamanan, dan subyek (aktor) keamanan, yang dijelaskan di dalam tabel 3.

Tabel 2. Sifat dan Subyek Ancaman Keamanan [15]

<i>Threats</i>	<i>The Threatened</i>			
	<i>Individuals</i>	<i>Societal groups</i>	<i>Government</i>	<i>The World</i>
<i>Individuals</i>	<i>Crime hate crimes</i>			
<i>Societal groups</i>	<i>Hate crimes</i>	<i>Genocide</i>	<i>Civil war</i>	
<i>Government</i>	<i>Human right, abuses</i>	<i>Genocide, politicide</i>	<i>War, economic sanctions</i>	<i>Nuclear war</i>
<i>Global</i>	<i>Poverty, industrial accidents, pollution</i>	<i>Global warming</i>	<i>Global warming</i>	
<i>Non-human</i>	<i>Disease, natural disasters</i>			<i>Asteroid/ comet collision</i>

Tabel 3. Karakteristik *Human-Centric Security* dan *State-Centric Security* [16]

<i>Characteristic</i>	<i>Human-Centric Security-The Narrow School</i>	<i>State-Centric Security</i>
<i>Referent Object</i>	<i>People at risk of political violence</i>	<i>State and Territory at risk of outside military interference or invasion</i>
<i>Threat/s</i>	<p><i>Organized political violence:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Civil war (involving the government and rebel or communal groups)</i> ● <i>Non-state conflicts (involving communal or rebel groups or warlords but not government)</i> ● <i>One-sided violence (involving government forces or non-state armed groups against defenseless civilians)</i> 	<i>Political violence from the military forces of other states</i>
<i>Practical Means</i>	<p><i>Military and non-military:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Prevention: diplomacy; addressing the causes of conflict; international regimes for countering small arms/light weapons trade and anti-personnel land mines; deterrent measures (e.g. ICC, war-crimes tribunals)</i> ● <i>Reaction: diplomacy; mediation; humanitarian military intervention, etc.</i> ● <i>Rebuild diplomacy; state and nation building; law and order through policing;</i> 	<p><i>Military and non-military:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>The military power of the state</i> ● <i>Diplomacy.</i> <p><i>The means are based on an assumption that sovereignty is an inviolable right</i></p>

<i>Characteristic</i>	<i>Human-Centric Security-The Narrow School</i>	<i>State-Centric Security</i>
	<i>judicial systems; the broad school agenda.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The means are based on the assumption that sovereignty is a responsibility not simply a right.</i> 	
<i>Actors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The state: outside state and depending on the situation, domestic governments</i> • <i>Non-state: international, regional and domestic</i> 	<i>The government/state, the military forces of the state</i>

Penjelasan Kerr dalam tabel 3 sebenarnya menunjukkan relevansinya bahwa perang baru (*new wars*) dalam hal ini seperti yang telah terjadi di Sudan, telah mengubah tujuan misi dan pelaksanaan misi secara internasional yang dipahami sebagai ciri-ciri peran militer *postmodern*. Peran militer dalam hal ini juga mensintesisasikan pergeseran fungsi dan tujuan militer dalam dualisme tabel 3, kepada ciri-ciri militer *postmodern*. Ciri-ciri militer *postmodern* yang termanifestasikan ke dalam dualisasi *human-centric security* dan *state-centric security* yang dapat dipahami melalui peran *Peacekeeping Operations* dalam Konflik Sudan [17].

Dalam melaksanakan resolusi konflik dan *peacekeeping operations* untuk melaksanakan misi perdamaian pada konflik di Sudan Selatan dan Darfur, terdapat beberapa proses perundingan, negosiasi, bantuan kemanusiaan, dan perjanjian perdamaian yang diupayakan oleh berbagai aktor, disesuaikan dengan enam tugas pokok personel militer dalam *peacekeeping operations*, yaitu: *protect civilians and UN personnel* (melindungi penduduk sipil dan personel PBB), *monitor a disputed border* (mengawasi wilayah konflik), *monitor and observe peace processes in post-conflict areas* (mengawasi dan mengobservasi proses perdamaian pasca konflik), *provide security across a conflict zone* (menjamin keamanan sepanjang wilayah konflik), *protect civilians* (melindungi warga sipil), *assist in –country military personnel with training and support* (Menyediakan pelatihan dan bantuan untuk anggota militer terkait misi perdamaian dan keamanan). Kemudian yang terakhir yaitu *assist ex-combatants in implementing the peace agreements they may have signed* (membantu para eks-kombatan untuk melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati). [18] Selanjutnya keenam tugas pokok personel militer dalam misi perdamaian kembali pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2086 tahun 2013.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2086 tahun 2013 merupakan tugas pokok dan fungsi personel militer dalam *multidimensional peacekeeping operations* yang terdiri atas sepuluh misi perdamaian, yaitu [19]: *provide support to basic safety and security by assisting national security sector reform programs* (membantu program-program pemulihan keamanan), *enable national governments to conceive and developing the programs of disarmament, demobilization, and reintegration* (membantu pemerintah setempat untuk melakukan program *disarmament, demobilization*, dan *reintegration*), *support the strengthening of rule of law institutions of the host country, in a coordinated manner with other United Nations entities, within the scope of respective mandates, in helping national authorities develop critical rule of law priorities* (memperkuat institusi negara atau pemerintah setempat di bawah aturan hukum), *provide for rapid response in mine action* (menyediakan bantuan bagi tindakan pembersihan medan ranjau).

Support peace consolidation and inclusive political processes and through their good offices, advice and support (memberikan pelayanan, bantuan dan saran terkait proses perdamaian dan politik), *help to establish the necessary security conditions to facilitate delivery of humanitarian assistance, taking into account the special needs of refugees, IDPs, women, children, elderly and disabled people, and to create conditions necessary for voluntary, safe, dignified and sustainable return of refugees* (memberikan kontribusi terhadap keamanan yang dibutuhkan terkait bantuan kemanusiaan dan menciptakan berbagai kondisi yang dibutuhkan pemindahan dan penempatan kembali para pengungsi).

Contribute towards agreed international efforts to protect human rights including through monitoring and prevention and support national governments (memberikan kontribusi terhadap setiap upaya internasional yang ditujukan untuk melindungi hak

asasi manusia, termasuk selama masa monitoring), *protect civilians, particularly those under imminent threat of physical violence* (melindungi penduduk sipil dari kemungkinan terjadinya ancaman secara fisik), *Cooperate and coordinate with United Nations agencies and funds and programs, as well as all relevant partners including international financial institutions and donors, to support the host government and relevant government institutions in designing poverty reduction and economic development policies* (bekerjasama dan berkoordinasi dengan setiap unsur, bantuan, program dan mitra PBB di setiap bidang terkait pembangunan ekonomi). Selanjutnya yang terakhir berupa *Support the participation of women in conflict prevention, conflict resolution and peacebuilding* (melibatkan peran wanita dalam kegiatan pencegahan konflik, manajemen konflik, dan pembangunan perdamaian)

Tugas pokok dan fungsi *multidimensional peacekeeping operations* tersebut diatas kemudian tercerminkan dalam berbagai proses misi perdamaian oleh berbagai misi dan program dalam konflik Sudan baik perselisihan di Sudan Selatan dan Darfur. Dimana jauh sebelum *multidimensional peacekeeping operations* tersebut dibuat, pada awalnya melalui resolusi DK-PBB No.1590/2005 dibentuklah UNMIS (*United Nations Mission In Sudan*). UNMISS kemudian memfasilitasi pelaksanaan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Sudan dan SPLA (*Sudan People's Liberation Movement*). Disamping menjalankan misi-misi keamanan dan perdamaian yang mencakup bantuan kemanusiaan perlindungan dan promosi penegakan hak asasi manusia. [20]

Dalam perkembangannya kemudian, implementasi resolusi tersebut diatas juga dilakukan melalui berbagai proses perwujudan resolusi konflik seperti: *Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS)*, pembentukan *Transnational Government of National Unity (TGoNU)*, pembentukan *United Nations Interim Security Force in Abyei (UNIFSA)*, pemberian lebih dari 500.000 fasilitas bantuan Kemanusiaan dan pembentukan *United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID)*. [18]

Dalam hubungannya dengan UNAMID sebagai bagian dari *peacekeeping operations* di Konflik Sudan, maka penjelasan tugas pokok dan fungsi *multidimensional peacekeeping operations* merefleksikan peran ciri-ciri militer postmodern dari pengertian tradisional (keamanan militer), kepada

pelaksanaan misi-misi internasional yang disahkan (atau setidaknya dilegitimasi oleh entitas di luar negara-bangsa). Pengertian *postmodern* dalam hal ini diperkuat dalam penjelasan mengenai lima karakteristik militer *postmodern* [21]: *pertama*, interpenetrasi bidang sipil dan militer; *kedua*, menurunnya penekanan pada perbedaan antar angkatan, pangkat dan mengaburnya batas antara pasukan tempur dan pasukan pendukung; *ketiga*, perubahan misi dari perang ke misi kemanusiaan atau penyelesaian konflik dengan intensitas pertempuran yang lebih kecil; *keempat*, munculnya kecenderungan untuk melaksanakan misi secara multilateral ketimbang unilateral, melalui pasukan koalisi di bawah pengawasan internasional; dan *kelima*, internasionalisasi pasukan militer.

Selanjutnya yang perlu digaris bawahi dari lima karakteristik militer *postmodern* adalah berangkat dari istilah *postmodern* yang dipakai untuk bentuk organisasi angkatan bersenjata jelas mengimplikasikan adanya perbedaan signifikan dari bentuk organisasi militer yang modern. Sebab, jika tidak, *postmodern* hanya merupakan semacam kesalahan aplikasi lain dari kata sifat yang sudah terlalu sering dipakai (*The Term "postmodern" as applied to the armed forces must imply some significant departure from 'modern' forms of organization. Otherwise, "postmodern" is just another misapplication of an overworked adjective*). [17]

Pergeseran peran dan fungsi militer terkait tujuan misi dan pelaksanaan tujuan misi secara internasional berasal dari perang baru (*new wars*) di konflik Sudan yang mengancam keamanan manusia menurut pandangan Kaldor sebelumnya, hal ini diperkuat oleh penjelasan Booth dan Moskos di atas pada dasarnya merupakan tujuan misi dan pelaksanaan tujuan misi dalam peran militer berupa operasi pemeliharaan perdamaian dunia (*peacekeeping operations*) terkait dengan menjaga ketertiban dan keamanan internasional. Yang di dalam hal ini terkait pada operasi misi pemeliharaan di Konflik Sudan. Tujuan dan pelaksanaan misi perdamaian dunia yang dijalankan oleh peran militer dalam konflik Sudan tersebut sebenarnya memberikan fungsi keamanan manusia dan negara yang berusaha membebaskan manusia dari ikatan ancaman keamanan militer dan non-militer.

Membebaskan manusia dari keterikatan ancaman keamanan militer dan non-militer menurut Booth merupakan suatu bentuk emansipasi pendekatan

keamanan. Penjelasan emansipasi dalam pandangannya adalah: [22]

“Security means the absence of threats. Emancipation is the freeing of people (as individuals and groups) from those physical and human constraints that stop them from carrying out what they would freely choose to do. War and the threat of war are some of those constraints, together with poverty, poor education, political oppression, and so on. Security and emancipation are two sides of the same coin. Emancipation, not power and order, produces true security. Emancipation, theoretically, is security.”

(Keamanan merupakan ketidakhadiran ancaman. Emansipasi membebaskan manusia (sebagai individu dan kelompok) dari berbagai tekanan fisik dan kemanusiaan yang menghambat segala pilihan hidup mereka. Perang dan ancaman perang adalah sebagian dari tekanan tersebut, bersama dengan kemiskinan, pendidikan yang buruk, penindasan politik, dan sebagainya. Keamanan dan emansipasi adalah dua sisi dari pengertian yang sama. Emansipasi, bukan hasil dari kekuasaan dan tatanan kekuasaan. Emansipasi menghasilkan keamanan yang sebenarnya. Emansipasi secara teoritis adalah keamanan)

Berdasarkan penjelasan emansipasi keamanan tersebut maka misi pemeliharaan perdamaian dunia merupakan bagian dari pelaksanaan emansipasi keamanan itu sendiri sebagai instrumen perdamaian dan keamanan. Dijelaskan bahwa: *Peacekeeping is defined as an instrument for peace and security by three mutually reinforcing core principles listed below: consent, impartiality, and no-use of force* (Pemeliharaan perdamaian merupakan suatu instrumen perdamaian dan keamanan yang diperkuat satu sama lain berdasarkan tiga prinsip: persetujuan bersama, bersikap netral/tidak memihak dan tidak menggunakan kekerasan). [18]

Dengan demikian, relevansi peran militer dalam *new wars* melalui *peacekeeping operations* lebih menekankan pada peran kolaboratif pembebasan ancaman keamanan dalam memberikan jaminan kebebasan manusia dari ancaman militer maupun nonmiliter. Keamanan manusia dalam hal ini menjadi suatu bagian dari keamanan kritis karena tidak dapat dipisahkan akses ancaman militer dan nirmiliter terhadap *freeing of the people* dari ketidakhadiran ancaman (*absence of threats*) yang cenderung *narrow approach* seperti *personal violence (individuals)* dan *broad approach* berupa

structural violence (societal, government and the world). Kedua bentuk *violence* yang hadir secara personal maupun struktural (lingkungan manusia) menjadi suatu tantangan secara *practical means* dalam penjelasan Kerr sebelumnya dikaitkan dengan pembebasan ancaman keamanan manusia dari problematika *sovereignty, citizenship* dan *harm* oleh pemikiran Linklater sebelumnya.

KESIMPULAN

Diskursus obyek referensi manusia melalui dialektika pemikiran tentang esensi keamanan manusia ingin membebaskan manusia dari manifestasi dikotomi ancaman keamanan militer dan non-militer. Keduanya dalam Konflik Sudan membelenggu eksistensi kehidupan manusia sebagai objek referensi keamanan sebagai bagian dari entitas politik keamanan nasional/negara, terkait pembebasan dikotomi ancaman keamanan militer dan non-militer yang cenderung didefinisikan secara dominatif dalam konteks persepsi negara. Melalui aspek manusia sebagai bagian dari entitas politik keamanan negara, maka eksistensi kehidupan manusia menjadi rawan terhadap implikasi terjadinya perang. Perang/konflik kekerasan terbuka di Sudan dalam hal ini ditafsirkan sebagai adanya perang baru (*new wars*) yang lambat laun membuat negara mengeksploitasi eksistensi manusia yang berada pada sebuah pusat berbagai mobilisasi tekanan hegemoni ketertindasan, kerusakan dan ketiadaan berbagai sumber kebutuhan dan keinginan sebagai manusia merdeka.

Kehadiran kolaboratif peran militer dan non-militer dalam *peacekeeping operations* di Konflik Sudan memberikan ruang solusi sintesis akan mobilisasi tekanan hegemoni tersebut di atas terhadap sekuritisasi kosmopolitan. Hal inilah yang menjadi esensi krusial dari perwujudan keamanan manusia sebenarnya yang merupakan kristalisasi berbagai alternatif pilihan signifikan manusia akan aktualisasi kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Keamanan manusia dalam emansipasi keamanan menegaskannya sebagai usaha untuk mencapai *freeing people* akan sintesis dualisme relasi kritical keamanan manusia dan negara. Relevansi kolaboratif peran militer dan non-militer dalam *peacekeeping operations* di Konflik Sudan adalah membebaskan manusia dari berbagai ragam opresif kebutuhan dan keinginan manusia yang belum termaksimalkan realisasinya secara praksis empiris, dikarenakan oleh implikasi akses

ancaman keamanan militer maupun non-militer dalam Konflik di Sudan itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak LP2M Universitas Al-Azhar Indonesia selaku pemberi dana penelitian *Stimulus Research Grant* (SRG) tahun 2022. Kemudian juga Laboratorium Prodi HI, dalam penyediaan bahan-bahan literatur maupun sarana penelitian selama kegiatan penelitian ini berlangsung dan terlaksana. Sebagai bagian dari pengembangan dan kemajuan program Tridharma Perguruan Tinggi di lingkup Universitas Al-Azhar Indonesia. Rizal Adhitya Hidayat, Deni Angela dan Ghina Hana Zafira.

REFERENSI

- [1] Morghentau HJ. Politik Antar Bangsa. Terjemahan: S.Maimoen, Fatwan dan Cecep Sudrajat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor; 2010.
- [2] Russett B, Starr H, Kinsella D. *World Politics: Menu for Choice*. Boston: Wadsworth; 2010.
- [3] Council on Foreign Relations. 16 May. 2023 [cited 2024 Oct 31]. Understanding Intrastate Conflict | CFR Education. Available from: <https://education.cfr.org/learn/reading/understanding-intrastate-conflict>
- [4] Upssala 2022. UCDP Conflict Encyclopedia (UCDP database) [Internet]. [cited 2022 Sep 7]. Available from: <https://ucdp.uu.se/downloads/charts/>
- [5] Hadiwinata BS. Transformasi Isu dan Aktor Di Dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme Hingga Konstruktivisme. Hermawan YP, editor. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2007.
- [6] United Nations Trust Fund for Human Security. The Human Security Approach and Its Added Value. In: United Nations. 2016. p. 7.
- [7] Omede J, Ngwube A, Idowu AO. Appraising India's Role In United Nations Peacekeeping Operations In Africa: The Case Of South Sudan. *Assumption University-eJournal of Interdisciplinary Research (AU-eJIR)*. 2017;2(2):65–78.
- [8] Onamu B, Nyadera N. I. Paramilitary Forces, Domestic Politics and Conflict: A Case of the Sudan Crisis. *Obrana a strategie (Defence and Strategy)*. 2024 Jun 30;24(1):143–158.
- [9] Skårås M. Focused Ethnographic Research on Teaching and Learning in Conflict Zones: History Education in South Sudan. *Forum Dev Stud*. 2018;45(2).
- [10] Verjee A. Sudan, South Sudan, and Darfur: what everyone needs to know. *International Affairs* (London). 2012;88(6).
- [11] The International Institute for Strategic Studies. *The Armed Conflict Survey 2020: The Worldwide Review of Political, Military and Humanitarian Trends in Current Conflict*. New York: Routledge-Taylor and Francis Group; 2020.
- [12] Johnson A. *New Wars and Human Security: An Interview with Mary Kaldor*. 2007;1–22.
- [13] Kaldor M. *New & Old Wars: Organised Violence in A Global Era*. 3rd ed. Cambridge: Polity Press; 2012.
- [14] Paul Hirst. *Perang dan Kekuatan Di Abad Ke-21: Konflik Militer, Negara dan Sistem Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2004.
- [15] Hough P. *Understanding Global Security*. New York: Routledge; 2008.
- [16] Kerr P. *Human security*. Contemporary Security Studies. Collins A, editor. London: Oxford University Press; 2013.
- [17] Moskos CC, John Allen Williams, David R.Segal. *Militer Pasca Perang Dingin: Militer Posmo*. Maarif S, editor. Jakarta: Prenada Media Group; 2010. 1–415 p.
- [18] UN Peacekeeping. UN Peacekeeping. 2022 [cited 2022 Nov 10]. What UN Military Personnel Do. Available from: <https://peacekeeping.un.org/en/military>
- [19] UN Security Council. 21 January 2013. 2013 [cited 2022 Dec 5]. p. 1–6 Resolution 2086 (2013) UNSCR. Available from: <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2086>
- [20] 2005) UNSC (60th year: Resolution 1590 (2005) /: adopted by the Security Council at its 5151st meeting, on 24 March 2005 [Internet]. UN; 2005 [cited 2024 Oct 1]. Available from: <https://digitallibrary.un.org/record/544317>
- [21] Booth B, Kestnbaum M, Segal DR. Are post-Cold War militaries postmodern? *Armed Forces Soc*. 2001;27(3).
- [22] Booth K. Security and emancipation. *Rev Int Stud*. 1991 Oct;17(4):313–26.